

TATA KELOLA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH : STUDI KUALITATIF

Suripto¹, Sukirno², dan Victor Prasetya³

Intitut Teknologi dan Bisnis ADIAS Kabupaten

Email : ripto72.legowo@gmail.com¹ , sukirnopml@gmail.com² ,
victor.prasetya2@gmail.com

ABSTRAKSI

Di negara demokrasi seperti Indonesia, kebutuhan akan informasi tentang publik sangat penting, termasuk informasi public pemerintah daerah. Dimana, mekasnisme transparansi bagi pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitasnya. Serupa dengan perusahaan, pemerintah daerah harus bertanggung jawab pada berbagai stakeholder, diantaranya bondholder, pembayar pajak, badan regulasi dan publik secara umum. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders adalah dengan menerapkan praktik tata kelola yang baik. Namun demikian, masih perlu ada peninjauan terhadap tata kelola dan akuntabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia. Ada catatan bahwa lembaga – lembaga pemerintah daerah banyak yang belum memiliki kapasitas dan belum mampu mengelola sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara yaitu wawancara semi struktur dengan bebrbagai stakeholder, antara lain pegawai pemerintah daerah yang berwenang, anggota dewan daerah dan masyarakat yang peduli dengan APBD kapupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Hasil temuan penelitian memberikan gambaran bahwa di pemerintah kabupaten telah menerapkan tata kelola pemerintah daerah. Meskipun pada proses penentuan besaran (angka) anggaran pendapatan dan belanja (APBD) masih perlu penjelasan yang lebih lanjut.

Kata kunci : *Pemerintah Daerah, Stakeholder, Tata Kelola dan APBD*

ABSTRACT

In a democratic country like Indonesia, the need for information about the public is very important, including local government public information. Where, the transparency mechanism for local governments can increase their accountability. Similar to companies, local governments must be accountable to various stakeholders, including bondholders, taxpayers, regulatory agencies and the public in general. One way to increase stakeholder trust is to apply good governance practices. However, there is still a need for a review of the governance and accountability of local governments in Indonesia. There is a note that many local government institutions do not have the capacity and have not been able to manage their resources, especially financial resources effectively and efficiently. Through qualitative research methods with interview techniques, namely semi-structured interviews with various stakeholders, including authorized local government employees, regional council members and people who care about the district budget in the Central Java Province. The results of the research findings illustrate that the district government has implemented local government governance. Although in the process of determining the amount (number) of the revenue and expenditure budget (APBD), further explanation is needed.

Keywords : *Local Government, Stakeholders, Governance and APBD*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di negara demokrasi seperti Indonesia, kebutuhan akan informasi tentang publik sangat penting. Informasi menjadi kebutuhan pokok dan hak asasi setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat turut serta dalam pengawasan penyelenggara negara dan Badan Publik lainnya (UU No. 14 tahun 2008). Badan publik dalam hal ini termasuk pemerintah daerah (Adiputra dkk. 2018) yang salah satunya harus menginformasikan pelaporan keuangan, diantaranya laporan tahunan, laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi (operasional), dan laporan tanggung jawab sosial yang telah diaudit serta laporan lainnya (UU No. 14 tahun 2008). Keterbukaan informasi publik sebagai bentuk transparansi sehingga dapat memberikan kepercayaan dan akuntabilitas pada publik (Rios dkk. 2018 dan Joseph dkk. 2019). Umumnya transparansi juga sering dikaitkan dengan pemerintahan yang lebih akuntabel, sah, efektif dan demokratis (Gupta, 2010). Lebih lanjut Gupta (2010) memberikan argumen bahwa transparansi dapat menekan korupsi, mengurangi konflik dan dapat meningkatkan akuntabilitas. Hal senada diungkapkan oleh Schleifer dkk. (2019) yang menyatakan bahwa melalui mekanisme transparansi, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitasnya. Begitupun Chen dkk (2016) menyatakan hal yang serupa bahwa transparansi meningkatkan citra dan kredibilitas pemerintah, terutama pengungkapan informasi keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor baik dari dalam maupun dari luar.

Pada dasarnya pemerintah daerah serupa dengan perusahaan, dimana harus bertanggung jawab pada berbagai stakeholder, termasuk bondholder, pembayar pajak, badan regulasi dan publik secara umum (Fitzgerald dan Giroux, 2014). Pandangan ini didukung oleh Enguix, dkk (2019) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat dilihat dari sudut pandang organisasi. Dimana sistem kontrol internal dengan pengungkapan informasi keuangan di internet oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk memperkuat dan meningkatkan transparansi dalam kegiatan publik dan untuk mengenali dan menjamin akses ke informasi. De Blasio and Selva (2016) memberikan ulasan bahwa pemerintahan harus ada keterbukaan diantaranya transparansi, akses informasi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik harus diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik. Tata kelola yang baik sangat penting untuk mengklarifikasi dan menegakkan standar dan untuk memberikan panduan eksplisit terkait dengan cara pejabat publik dan badan-badan perlu melaksanakan tugas dan akuntabilitas mereka di yurisdiksi tertentu. Beberapa faktor tata kelola yang baik juga mempengaruhi elemen kualitas sektor publik. Sementara pemerintah mengarahkan upaya dalam hal program dan anggaran untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara efisien (Said, dkk. 2016). Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders adalah dengan menerapkan praktik tata kelola yang baik yang dapat berkontribusi pada pengungkapan keuangan yang lebih baik dan pelaporan bisnis yang lebih transparan (Haat, dkk. 2008).

Penerapan tata kelola merupakan konsep untuk melindungi kepentingan stakeholder (Najjar dan Abed, 2014 dan Ji, dkk. 2015). Namun, tata kelola bukan satu-satunya alat untuk melindungi stakeholder, tapi setidaknya tata kelola dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Madanoglu dan Karadag, 2016). Begitu juga tata kelola dapat digunakan untuk mengukur kinerja (Madanoglu dan Karadag, 2016;

Kowalewski, 2016; Bhatt dan Bhatt, 2017; Izquierdo dan Blandon, 2017). Lebih lanjut tata kelola dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Ji, dkk. 2015; Najjar dan Abed, 2014; Hashim dan Devi, 2008). Tata kelola juga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi, baik keuangan maupun non keuangan (Kwame dan Mensah, 2017; Qu, dkk. 2015; Liu, 2015; Teruki dkk. 2018; Diftar dkk, 2017; Hsu dkk. 2015; Bone dan White, 2015; Wang, dkk. 2014).

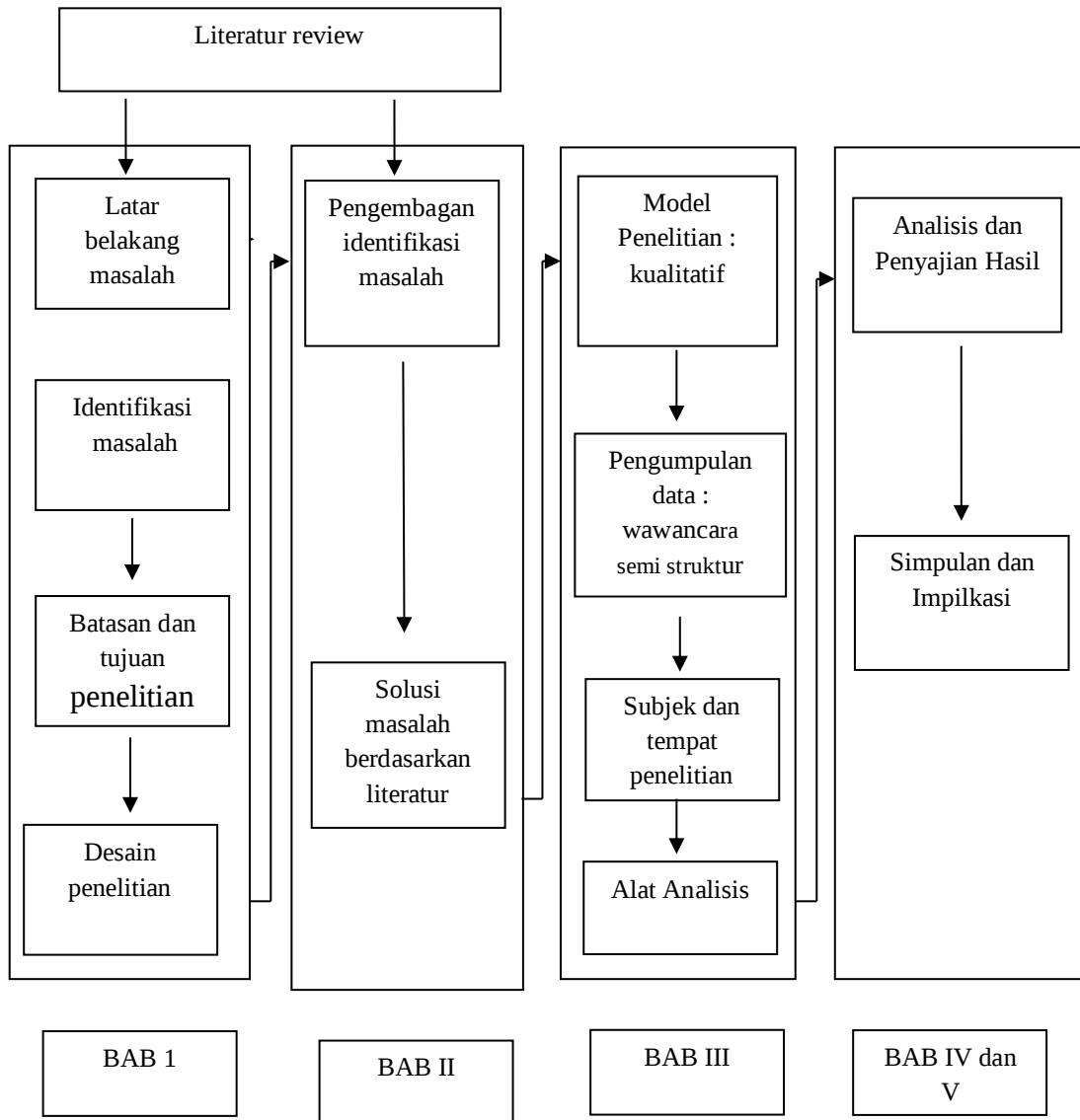
Namun demikian, masih perlu ada peninjauan terhadap tata kelola dan akuntabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia. Dimana lembaga – lembaga pemerintah daerah banyak yang belum memiliki kapasitas dan belum mampu mengelola sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Kekhawatiran atas kurangnya akuntabilitas, salah urus sumber daya, efisiensi dan keefektifan institusi pemerintah daerah seringkali disuarakan media (Basri dan Nabiha, 2014). Padahal telah disadari bahwa ada kesenjangan dalam mengukur transparansi, akuntabilitas dan tata kelola di pemerintah daerah (Da Cruz, dkk. 2016).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui mekanisme tata kelola pemerintah yang baik, maka pengungkapan informasi, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan dapat terwujud sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik. Ini senada dengan Cohen, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa sesuai dengan kerangka teoritis yang dikeluarkan oleh dewan penetapan standar (GaSb, 1987; IPSASB 2014), pelaporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi untuk membantu pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. sementara penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan peran stakeholder dalam penyusunan anggaran untuk menciptakan tata kelola sehingga diharapkan menciptakan akuntabilitas pemerintah daerah.

Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, pemerhati kebijakan pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat. Memberikan gambaran manfaat dari tata kelola dan pengungkapan informasi untuk meningkatkan akuntabilitas publik, khususnya pemerintah daerah kabupaten. Menambah khazanah dalam pengembangan teori yang berhubungan dengan tata kelola pemerintah dan pengungkapan informasi.

Desain penelitian



METODE

Desain Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, seperti yang dikembangkan oleh Belal, dkk. (2015) dan Basri dan Nabiha (2014), yaitu wawancara semi struktur. Pengumpulan data dengan wawancara semi struktur dengan stakeholder, antara lain pegawai pemerintah daerah yang berwenang, anggota dewan daerah dan masyarakat yang peduli dengan APBD kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pandangan umum mereka dari pemerintah daerah pada kabupaten, khususnya mengenai isu-isu tata kelola dan akuntabilitas (Basri dan Nabiha, 2014).

Penentuan responden dengan menggunakan pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) sebagai sampel penelitian. Metode ini menyatakan bahwa pengambilan sampel harus memiliki kriteria tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu (*Judgment sampling*) dari peneliti (Sekaran, 2010 dan Cooper dan Schindler,

2006). Adapun responden yang menjadi sampel penelitian dengan kriteria sebagai berikut :

- Pendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan keuangan
- Bekerja dipemerintah daerah bagian anggaran lebih dari 5 tahun
- Anggota dewan yang membidangi anggaran daerah
- Masyarakat yang peduli terhadap anggaran daerah

Pengumpulan data dilakukan selama 5 hari dari tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan 1 Nopember 2019. Penentuan wawancara dengan responden dilakukan dengan membuat janji terlebih dahulu melalui media handphone. Berdasarkan janji yang disepakati, peneliti mendatangi responden untuk melakukan wawancara. Seperti yang dilakukan Belal, dkk. (2015) pada saat wawancara direkam melalui media handphone dengan seijin dari responden dan identitas responden dirahasiakan. Hasil rekaman kemudian di transkrip dalam bentuk tulisan. Tahap selanjutnya dilakukan koding untuk di analisis.

Prosedur Pengumpulan Data

Penggunaan wawancara dapat membantu mengumpulkan data yang valid, andal dan relevan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Penyusunan pertanyaan pada penelitian semi terstruktur tidak dibuat standar, hal ini, agar wawancara dapat mengalir dan informasi yang didapat mendalam (Saunders, dkk. 2009) Adapun prosedur wawancara diawali dari pembuatan janji bertemu, pada saat bertemu mengucapkan salam dan berjabat tangan. Sebelum wawancara dilakukan, ada penjelasan pendahuluan dan maksud tujuan wawancara, ini seperti yang Belal, dkk. (2015) lakukan. Wawancara dilakukan rata-rata 20 menit. Diakhir wawancara dilakukan ucapan terimakasih dan berjabat tangan serta ditutup dengan salam.

Menurut Saunders, dkk. (2009) pada peneltian dengan menggunakan wawancara semi struktur dan tidak distandarkan, tidak lepas dari bias. Hal ini karena ada pemaksaan keyakinan dan kerangka referensi sendiri. Selain itu, kemungkinan ada bias dalam cara menafsirkan respons dari responden. Namun, Peneliti berusaha menjaga objektivitas dan menyajikan sesuai dengan fakta yang ada.

Selanjutnya responden dalam penelitian ini melibatkan tiga responden. Responden pertama merupakan pegawai pemerintah bidang anggaran, berpendidikan S2 akuntansi, bekeja lebih dari lima tahun dan sering mewakili rapat dengan anggota dewan. Responden kedua, anggota dewan yang membidangi komisi anggaran, berpendidikan S2 manajemen, menjadi anggota dewan sudah dua periode. Sedangkan responden ketiga, masyarakat yang peduli dengan pemerintah daerah khususnya anggaran dan juga memiliki profesi sebagai dosen, berpendidikan S2 akuntansi, menjadi dosen lebih dari 5 tahun dan pernah dua kali di undang dan diminta memberi masukan dalam pembahasan musyawarah rencana dan pembangunan pemerintah daerah.

HASIL

Analisis Data

Tahap analisis dengan melakukan pemilahan data menjadi beberapa unit atau disebut pengkodean terbuka (koding). Data yang dikumpulkan akan dipilah menjadi unit-unit konseptual dan diberi label atau kategori. Label atau kategori dengan nama yang sama akan dikelompokkan menjadi unit data yang serupa. Kategorisasi yang diperoleh dari data yang ada

akan menunjukkan tema dan masalah yang signifikan dan membantu untuk mempertimbangkan di mana pengumpulan data harus difokuskan. Sehubungan dengan ini, kategorisasi akan membantu untuk mengembangkan fokus yang lebih tajam dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian (Saunders, dkk. 2009). Pada penelitian ini pemilahan data dan pemberian *coding* dengan cara manual. Peneliti beralasan karena data masih sedikit yaitu tiga responden, sehingga memungkinkan untuk melakukan *coding* secara manual.

Penyajian Hasil Penelitian

Penggunaan teori penelitian pada penelitian kualitatif masih diperlukan untuk membatasi permasalahan agar tidak meluas (Saunders, 2009 dan Belal, dkk. 2015). Ada berbagai teori penelitian dalam lingkungan penelitian akuntansi yang telah dikembangkan, diantaranya teori institusional. Teori ini hadir untuk melengkapi teori-teori yang sudah ada (Haraldsson, 2016), dimana informasi akuntansi yang kompleks belum seluruhnya terjawab oleh teori yang sudah ada. Teori institusional menawarkan kerangka kerja generik untuk menjelaskan dan menganalisis tentang hubungan antara praktik organisasi dan lingkungannya. Melalui proses adopsi dan adaptasi, norma dan aturan institusional berdampak pada posisi, kebijakan, program, dan prosedur organisasi. Ada kesamaan dalam praktik bisnis dalam suatu negara terutama dari tiga jenis tekanan dalam lingkungan institusional, koersif, mimetik dan normatif. Tekanan koersif datang dari peraturan pemerintah, tekanan mimetik terjadi ketika organisasi mengikuti sistem institusi yang ada di bidangnya dan tekanan normatif terjadi ketika administrator organisasi secara intuitif mengikuti praktik konvensional (Rahman, dkk. 2010). Selanjutnya Wu dan Patel (2015) memberikan catatan bahwa ahli teori institusional memandang bahwa aktivitas ekonomi sebagai fenomena sosial dan menekankan hubungannya dengan institusi sosial. Teori institusional berusaha mengatasi masalah sesuai yang tertanam dalam organisasi dalam hubungan aturan formal dan informal. Meskipun teori institusional banyak digunakan dalam bidang akuntansi manajemen, namun telah banyak digunakan oleh banyak peneliti untuk menjelaskan penerapan standar akuntansi internasional di berbagai negara.

Perkembangan teori institusional selama bertahun-tahun telah ditandai oleh pengaruh dari berbagai ide. Ahli teori institusional membedakan antara institusionalisme lama dan baru. Teori institusional lama berpendapat bahwa selera dan preferensi individu dibentuk oleh pengaruh institusional, termasuk aturan, kebiasaan, rutinitas, norma, dan asumsi yang diterima begitu saja. Pada teori institusional lama, isu-isu pengaruh, koalisi, dan nilai-nilai yang bersaing adalah sentral, bersama dengan kekuasaan dan struktur informal. Adapun teori institusional baru berpendapat bahwa organisasi melegitimasi operasinya dengan menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal untuk meningkatkan efisiensi internal. Pada institusional baru menekankan pada legitimasi dan keterikatan bidang organisasi. Para ahli teori institusional baru berasumsi bahwa struktur dan prosedur intra-organisasi, termasuk tata kelola perusahaan dan akuntansi, sebagian besar dibentuk oleh faktor-faktor eksternal. Sementara institusi terdiri dari struktur dan aktivitas kognitif, normatif, dan regulatif yang memberikan stabilitas dan makna bagi perilaku sosial. Ini berarti adopsi oleh organisasi harus sesuai aturan institusi tertentu, seperti tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan (Wu dan Patel, 2015).

Pandangan Rahman, dkk (2010) dan Wu dan Patel (2015) menjadi dasar pemikiran pada penelitian ini. Penulis mendukung argumen bahwa organisasi melegitimasi

operasinya dengan menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal untuk meningkatkan efisiensi internal. Tekanan bisa dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah (kuersif), bisa datang dari penerapan sistem dalam organisasi (mimetik) atau bisa dari praktik yang dijalankan karena kebiasaan (normatif). Menurut Penulis, penerapan teori institusional baru lebih tepat untuk membatasi pada penelitian ini dalam menjelaskan tata kelola dan pengungkapan informasi keuangan, termasuk biaya perawatan aset berwujud pada pemerintah daerah. Argumen yang dibangun oleh penulis bahwa pada dasarnya pemerintah daerah serupa dengan perusahaan atau organisasi yang bertanggung jawab pada pihak eksternal (stakeholder) dan pihak internal (Bondholder) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, salah satunya melalui pengungkapan informasi keuangan pada publik (Fitzgerald dan Giroux, 2014 dan Enguix, dkk. 2019).

- a. Proses penyusunan APBD dan keterlibatan stakeholder di pemerintah daerah kabupaten untuk menciptakan tingkat akuntabilitas.

Tata kelola merupakan istilah umum yang digunakan untuk aturan dan mekanisme yang digunakan oleh organisasi swasta atau publik untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Hubungan ini harus diatur, diatur, dipaksakan, dan ditegakkan dengan tepat (Mardjono, 2005) agar efektif dan untuk memastikan akuntabilitas organisasi kepada publik. Ini dapat disimpulkan bahwa peraturan yang diterapkan pemerintah (kuersif), dapat memaksa stakeholder agar berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan pada pemerintah daerah agar selaras dengan mekanismen tata kelola. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil temuan dari wawancara tiga responden tersebut, yaitu :

“Penyusunan APBD secara bertahap sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada, yaitu dari musyawarah rencana dan pembangunan desa (musrenbang), musyawarah rencana dan pembangunan kecamatan dan musyawarah rencana dan pembangunan kabupaten, selanjutnya dibahas dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk diberi masukan, kemudian diserahkan pada DPRD untuk dibahas dan disahkan”

Hasil temuan tersebut, sejalan dengan hasil penelitian Munoz, dkk. (2017), dimana peraturan pemerintah dapat memperkuat tingkat pengungkapan informasi keuangan publik sebagai upaya untuk menciptakan akuntabilitas. Hanis dkk. (2011) juga mendukung hasil tersebut, hal ini dinyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa ada dukungan perangkat perundangan-undangan dan peraturan lainnya. Adapun keterlibatan stakeholder dalam penyusunan APBD mendapat dukungan dari Teruki dkk. (2018) yang ditunjukkan dalam hasil penelitiannya bahwa pengungkapan keuangan dipengaruhi walikota dan manajer lainnya dalam pemerintah daerah. Dukungan hasil penelitian, juga diberikan oleh Kaur dan Lodhia (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dengan berbagai pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam seluruh proses akuntansi dan pelaporan keberlanjutan untuk membangun sistem akuntabilitas yang berpusat pada pemangku kepentingan yang efisien.

- b. Proses penentuan besarnya anggaran dalam APBD kabupaten.

Berdasarkan literatur terdahulu, bahwa melalui mekanisme tata kelola pemerintah yang baik, maka pengungkapan informasi, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan dapat terwujud sebagai sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas publik. Hal ini mendapat dukungan dari Cohen, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa sesuai dengan kerangka teoritis yang dikeluarkan oleh dewan penetapan standar (GaSb, 1987; IPSASB 2014), pelaporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi untuk membantu pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden, ada pernyataan, yaitu :

“Ketiga responden (stakeholder) tersebut tidak mengetahui penentuan besarnya angka yang disajikan dalam draf APBD, ketiganya hanya dapat mengalihkan pada anggaran yang lebih penting untuk dikerjakan lebih dahulu”

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan pernyataan Basri dan Nabiha (2014). Dimana lembaga – lembaga pemerintah daerah banyak yang belum memiliki kapasitas dan belum mampu mengelola sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Kekawatiran atas kurangnya akuntabilitas, salah urus sumber daya, efisiensi dan keefektifan institusi pemerintah daerah seringkali disuarakan media. Hanis dkk. (2011) juga menyatakan hal yang sama, bahwa pemerintah daerah belum memiliki sumber daya manusia yang memadai. Padahal kompetensi sumber daya manusia signifikan secara positif mempengaruhi kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, menurut Dewi, dkk. (2019) kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah secara langsung dan positif mempengaruhi akuntabilitas keuangan.

- c. Proses penentuan besarnya anggaran biaya perawatan aset berwujud dalam APBD kabupaten

Melalui penerapan tata kelola yang baik pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien, terutama manajemen aset dan sistem basis data yang komputerisasi untuk pengungkapan pada publik (Hanis, dkk. 2011). Manajemen aset fisik adalah bidang yang kompleks, di mana beberapa kegiatan dan disiplin ilmu berinteraksi dengan merencanakan dan mengendalikan siklus hidup aset (Shah, dkk. 2017). Organisasi mengandalkan aset sebagai elemen berharga yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kinerja keuangan (Brennan dan Mattice, 2013). Secara khusus, aset fisik adalah item penting, yang menawarkan nilai yang nyata bagi suatu organisasi (Teske, 2012). Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden (stakeholder) mengenai aset, yaitu :

“Pembahasan biaya perawatan aset berwujud itu ada, namun penentuan besaran angka yang disajikan dalam draf APBD, ketiganya tidak mengetahui proses penentuannya”

Hasil temuan tersebut belum sejalan dengan Aversano dan Christiaens (2014), dimana Aversano dan Christiaens (2014) menyatakan bahwa pengungkapan informasi aset peninggalan adalah penting. Aset peninggalan meliputi taman, museum, seni, jalan, cagar alam dan sumberdaya alam. Pandangan Aversano dan Christiaens (2014) berdasarkan penelitian observasi tentang pengungkapan informasi keuangan yang fokus pada aset peninggalan pada pemerintah daerah di Italia. Temuan dari hasil wawancara ini, disadari oleh Hanis dkk. (2011) bahwa pemerintah daerah belum memiliki sumber daya manusia yang memadai, terutama pakar dibidang manajemen aset publik dan komputerisasi aset publik.

SIMPULAN

Simpulan

Hasil temuan penelitian memberikan gambaran bahwa di pemerintah kabupaten telah menerapkan tata kelola pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten berusaha memberikan informasi, terutama informasi keuangan kepada publik demi menciptakan akuntabilitas publik. Ini dapat dilihat dari para stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD), tidak hanya melibatkan eksekutif dan legislatif saja, tetapi melibatkan juga tokoh masyarakat yang kompeten dalam bidang keuangan. Selain itu, Proses penyusunan sudah melalui prosedur yang memadai dengan mematuhi peraturan yang ada. Proses penyusunan dari bawah ke atas, yaitu dari musyawarah perencanaan dan pembangunan desa, kemudian dibahas pada musyawarah perencanaan dan pembangunan kecamatan dan selanjutnya dibahas di tingkat musyawarah perencanaan dan pembangunan kabupaten.

Namun demikian, pada proses penentuan besaran (angka) anggaran pendapatan dan belanja (APBD) masih perlu penjelasan yang lebih lanjut. Para stakeholder, baik legislatif, eksekutif dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyusunan APBD belum mampu menjelaskan proses penentuan besarnya angka dalam draf APBD. Begitupun pada penentuan besaran anggaran pada biaya perawatan aset, belum mampu menjelaskan dasar acuan penentuan besaran anggaran tersebut. Tingkat transparansi APBD kabupaten masih perlu ditingkatkan lagi untuk memberikan akuntabilitas publik yang memadai.

Terkahir, Penulis menyadari bahwa artikel ini sangat jauh dari sempurna karena hanya melibatkan tiga responden. Meskipun masing-masing stakeholder terwakili, namun belum memberikan informasi yang menyeluruh, terutama dasar penentuan besaran anggaran dan pentingnya objek tersebut dibiayai. Stakeholder yang jadi responden hanya mampu menjelaskan pengalihan atau menggeser anggaran, dari suatu anggaran ke anggaran lainnya yang dianggap penting menurut persepsi stakeholder yang jadi responden. Penelitian selanjutnya sangat perlu meneliti dasar acuan penentuan besaran APBD dan menambah responden yaitu tim penyusun anggaran (sumber daya manusia). Ini penting untuk diteliti untuk memberikan tingkat transparansi anggaran demi menciptakan akuntabilitas publik yang tinggi.

Implikasi

Artikel ini diharapkan dapat menjadi cermin bagi pemerintah daerah kabupaten untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Memberikan gambaran pada eksekutif dan legislatif bahwa melalui tata kelola dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Selain itu, memberikan pemahaman pada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam mengawasi jalannya pengelolaan APBD. Lebih lanjut bagi para peneliti untuk dapat mengembangkan lagi penelitian ini demi perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aaron, J. B., M. Denny, B. Desmarais dan H. Wallach. 2017. Transparency by Conformity : A Field Experiment Evaluating Openness in Local Government. *Public Administration Review* 77(1) : 68-77
- [2] Adam, B., R. Mussari dan R. Jones. 2011. The Diversity of Accrual Policies in Local Government Financial Reporting : An Examination of Infrastructure, Art and

- Heritage Assets in Germany, Italy and The UK. *Financial Accountability & Management* 27(2) : 107-132
- [3] Adiputra, I. M. P., S. Utama dan H. Rossieta. 2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research* 3(1) : 123-138
- [4] Akruti, E. K., dan R. Dwight 2013. A framework for the engineering asset management system. *Journal of Quality in Maintenance Engineering* 19 (4) : 398-412.
- [5] Al Marzooqi, F. A., Hussain, M., dan Ahmad, S. Z. 2018. Performance of Physical Asset Management Using the Analytic Hierarchy Process. *Property Management*.
- [6] Arifin, J. 2014. Isomorphic Pressures Influencing the Level of Mandatory Disclosure within Financial Statements of Indonesian Local Governments. Thesis of Degree of Doctor of Philosophy of Curtin University
- [7] Arifin, J. 2014. Isomorphic Pressures Influencing the Level of Mandatory Disclosure within Financial Statements of Indonesian Local Governments. Thesis of Degree of Doctor of Philosophy of Curtin University
- [8] Aversano, N., dan J. Christianens. 2014. Governmental Financial Reporting of Heritage Assets From a User Needs Perspective. *Financial Accountability & Management* 30 (2) : 150-174
- [9] Barrett, P 1997. Corporate Governance and Accountability for Performance. address to a joint seminar by IPAA and ASCPA. 27 August 1997, Canberra.
- [10] Barton, A. D. 1999. A Trusteeship Theory of Accounting for Natural Capital Assets. *Abacus* 35 (2) : 207–2
- [11] Basri, H., dan Nabiha, S. 2014. Accounting of Local Government : The Case of Aceh Province, Infonesia. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance* 3 (1) : 1-14
- [12] Beck, A. W., dan M. S. Stone. 2017. Why Municipalities Fail: Implications For Uncertainty Disclosures. *Research in Accounting Regulation* 29 (1) : 1-9
- [13] Belal, A. R., Cooper, S. M. dan Khan, N. A. 2015. Corporate environmental responsibility and accountability: What chance in vulnerable Bangladesh?. *Critical Perspectives on Accounting* 33 : 44–58
- [14] Benito, B., I. Brusca dan V. Montesinos. 2007. The Harmonization of Government Financial Information Systems: The Role of The IPSASs. *International Review of Administrative Sciences* 73 (2) : 293–317
- [15] Bhatt, P. R., dan R. Bhatt. 2017). Corporate governance and firm performance in Malaysia. *Corporate Governance : The International Journal of Business in Society* 17 (5) :896 – 912.
- [16] Boone, A. L., dan J. T. White. 2015.The effect of institutional ownership on firm transparency and information production. *Journal of Financial Economics* 117 (3) : 508-533
- [17] Brennan, J., dan L. Mattice. 2013. Managing physical asset risk – the historical core of most security programs. *Security Solutions for Enterprise Security Leaders* 50 (10)
- [18] Chen, Z., J. Pan, L. Wang dan X. Shen. 2016. Disclosure of government financial information and the cost of local government’s debt financing Empirical evidence

- from provincial investment bonds for urban construction. *China Journal of Accounting Research* 9(3) : 191-206
- [19] Clark, B. Y. 2015. Evaluating the Validity and Reliability of the Financial Condition Index for Local Governments. *Public Budgeting & Finance* 35 (2) : 66-88
- [20] Cohen, S., Rossi, F. M., Caperchione, E. dan Brusca, I. 2018. Local government administration systems and local government accounting information needs: is there a mismatch?. *International Review of Administrative Sciences* 0(0) : 1–18
- [21] Cooper, D. R., dan P. S. Schindler. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Volume 1 dan Volume 2. Edisi 9. Media Global Edukasi. Jakarta.
- [22] Da Cruz, N. F., Tavarea, A. F., Marques, R. C., Jorge, S. dan De Sousa, L. 2016. Measuring Local Government Transparency. *Public Management Review* 18 (6) : 866 - 893
- [23] De Blasio, E., dan D. Selva. 2016. Why Choose Open Government? Motivations for the Adoption of Open Government Policies in Four European Countries. *Policy and Internet* 8 (3) : 225-247
- [24] Deb, R. 2019. Accounting Theory Coherence Revisited. *Management and Labour Studies* :1–22
- [25] Dewi, N. F., Azama, S. M. F. Dan Yusoff, S. K. M. 2019. Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. *Management Science Letters* 9 : 1373–1384
- [26] Diftar, D.E., E. Jones, M. Ragheb dan M. Soliman. 2017. Institutional investors and voluntary disclosure and transparency: the case of Egypt. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 17(1) : 134 – 151.
- [27] Diftar, D.E., E. Jones, M. Ragheb dan M. Soliman. 2017. Institutional investors and voluntary disclosure and transparency: the case of Egypt. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 17 (1) : 134- 151.
- [28] Enguix, M. R. M., E. G. Gil, dan J. H. Fernández. 2019. Relation Between Internet Financial Information Disclosure and Internal Control in Spanish Local Governments. *Aslib Journal of Information Management* 71 (2) : 176 – 194
- [29] Ferry, L., P. Eckersley dan Z. Zakaria. 2015. Accountability and Transparency in English Local Government ; Moving from ‘Matching Part’ to ‘Awkward Couple’. *Financial Accountability & Management* 31 (3) : 345-361
- [30] Fitzgerald, B. C., dan G. A. Giroux. 2014. Voluntary formation of audit committees by large municipa governments. *Research in Accounting Regulation* 26 : 67–74
- [31] Guarini, E., A. De Toni dan C. Vallone. 2015. An Anatomy of Governance Failures in Municipal Bangkrupity. *Contingency, Behavioural and Evolutionary Perspectives on Public and Non-Profit Governance Studies in Public and Non-Profit Governance* 4 : 189 - 216
- [32] Gujarati, D. N., dan D. C. Porter. 2012. *Dasar - Dasar Ekonometrika*. Buku 1 dan 2. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.

- [33] Gupta, A. 2010. Transparency in Global Environmental Governance: A Coming of Age?. *Global Environmental Politics* 10 (3) : 1-9
- [34] Haat, M. H. C., R. A. Rahman dan S. Mahenthiran. 2008. Corporate governance, transparency and performance of Malaysian companies. *Managerial Auditing Journal* 23 (8) : 744-778
- [35] Hanis, M. H., B. Trigunarsyah dan C. Susilawati. 2011. The application of public asset management in Indonesian local government : A case study in South Sulawesi province. *Journal of Corporate Real Estate* 13 (1) : 36-47
- [36] Haraldsson, M. 2016. Transparency and accountability lost? Full cost accounting reporting in the Swedish municipal solid waste business. *Journal of Accounting & Organizational Change* 12 (3) : 254-280
- [37] Hashim, H. A., dan S. Devi. 2008. Board Characteristics, Ownership Structure and Earning Quality : Malaysia Evidence. *Corporate Governance in Less Developed and Emerging Economies (Research in Accounting in Emerging Economies)* 8 : .97 – 123.
- [38] Hastings, N.A.J. 2010. *Physical Asset Management*. Springer. London
- [39] Hooper, K., K. Kearins dan R. Green. 2005). Knowing The Price of Everything and the Value of Nothing : Accounting for Heritage Assets. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 18(3) : 410–33.
- [40] Hsu, C. H., S. C. Lai, Hung dan C. Li. 2015. Institutional ownership and information transparency: Role of technology intensities and industries. *Asia Pacific Management Review* : 1-12
- [41] Imke, F. J. 1966. Relationships in Accounting Theory. *The Accounting Review* 41 (2) : 318-322
- [42] Izquierdo, M. N., dan J. G. Blandon. 2017. Evaluating the link between commercial governance ratings and firm performance in a cross-European setting. *Management Decision* 5 (10) : 2089 - 2110
- [43] Joseph C., J. Gunawan, N. Madi, T. Janggu, M. Rahmat dan N. Mohamed. 2019. Realising Sustainable Development Goals Via Online Integrity Framework Disclosure: Evidence from Malaysian and Indonesian local authorities. *Journal of Cleaner Production* 215 : 112-122
- [44] Kaur, A., dan S. Lodhia. 2018. Stakeholder engagement in sustainability accounting and reporting: A study of Australian local councils. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 31(1) : 338-368
- [45] Kowalewski, O. 2016. Corporate governance and corporate performance: financial crisis (2008). *Management Research Review* 39 (11) : 1494 - 1515.
- [46] Kwame, B., dan A. Mensah. 2017. The relationship between corporate governance, corruption and forward-looking information disclosure: a comparative study Corporate Governance. *The International Journal of Business in Society* 17 (2) : 284-304.
- [47] Lind, D A., W. G. Marchal dan S. A. Wathen. 2007. *Teknik-Teknik Statistika Dalam Bisnis Dan Ekonomi*. Salemba Empat. Jakarta.

- [48] Liu, S. 2015. Corporate Governance and Forward-looking Disclosure: Evidence from China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* : 1-45
- [49] Madanoglu, M., dan E. Karadag. 2016. Corporate governance provisions and firm financial performance : the moderating effect of deviation from optimal franchising. *International Journal of Contemporary Hospitality Management* 28(8) : 1805 – 1822
- [50] Mahmood, M.N., S.P. Dhakal dan K. Brown. 2014. Asset management policies and guidelines of different states in Australia: a comparative analysis. *Journal of Facilities Management* 12(3) : 286-302.
- [51] Mardjono, A. 2005. A tale of corporate governance: Lessons why firms fail. *Managerial Auditing Journal* 20 (3) : 272-283.
- [52] Najjar, B.A., dan S. Abed. 2014. The association between disclosure of forward-looking information and corporate governance mechanisms: Evidence from the UK before the financial crisis period. *Managerial Auditing Journal* 29 (7) : 578 - 595
- [53] Pallot, J. 1992. Elements of a Theoretical Framework for Public Sector Accounting. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 5 (1) : 38–59.
- [54] Perez, C. C., M. P. R. Bolivar dan A. M. L. Hernandez. 2008. E-Government Process and Incentives for Online Public Financial Information. *Online Information Review* 32(3) : 379-400
- [55] Qu, W., M. S. Ee, L. Liu, V. Wise, dan P. Carey. 2015. Corporate governance and quality of forward-looking information. *Asian Review of Accounting* 23 (1) : 39 - 67.
- [56] Rahman, A., J. Yammesri dan H. Perera. 2010. Financial reporting quality in international settings: A comparative study of the USA, Japan, Thailand, France and Germany. *The International Journal of Accounting* 45 : 1 – 34
- [57] Ríos, A. M., M. D. Guillamón, B. Benito dan F. Bastida. 2018. The influence of transparency on budget forecast deviations in municipal governments. *Journal of Forecasting* 37 (4) : 457-474
- [58] Ryan, C., dan C. Ng (2000) Public sector corporate governance disclosures: An examination of annual reporting practices in Queensland. *Australian Journal of Public Administration* 59 (2) : 11-23.
- [59] Said, J. Md., M. Alam dan M. A. Khalid. 2016. Relationship between good governance and integrity system : Empirical study on the public sector of Malaysia. *Humanomics* 32 (2) : 151-171
- [60] Saunders, M., P. Lewis dan A. Thornhill. 2009. Research methods for business students. 5th ed. Pearson Education Limited : Harlow, England
- [61] Schleifer, P., M. Fiorini dan G. Auld. 2019. Transparency in transnational governance: The determinants of information disclosure of voluntary sustainability programs. *Regulation & Governance*.
- [62] Schoeman, J., dan P. Vlok. 2014. The possible influence of risk management, forecasting, and personnel training in asset management. *South African Journal of Industrial Engineering* 25 (2) : 96-104.
- [63] Scott, W. 2009. *Financial Accounting Theory. Fifth Edition*. Pearson Education. Canada

- [64] Sekaran, U. dan R. Bougie. 2010. *Research Methods for Business. A Skill - Building Approach. Fifth Edition*. A Jhon Wiley and Sons Ltd. West Sussex.
- [65] Sekaran, U., dan R. Bougie. 2010. *Research Methods For Business. A Skill - Building Approach. Fifth Edition*, A Jhon Wiley and Sons Ltd: West Sussex
- [66] Shah, R., O. McMann dan F. Borthwick. 2017. Challenges and prospects of applying asset management principles to highway maintenance: a case study of the UK”. *Transportation Research Part A* 97 (2) : 231-243
- [67] Susbiyani, A. 2015. Quality Of Financial Statements As Implementation Good Governance Government On Local Government In Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting* 6 (14) : 72-77
- [68] Teruki, N. A., R. O. dan N. K. Ahmed. 2018. Financial disclosure practices among Malaysian local authorities: a case study. *International Journal of Public Sector Management* 32 (1) : 42 – 64
- [69] Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. <https://www.kpk.go.id>.
- [70] Wang, P., F. Che, S. Fan dan C. Gu. 2014. Ownership Governance, Institutional Pressures and Circular Economy Accounting Information Disclosure: an institutional theory and corporate governance theory perspective. *International Journal of Contemporary Hospitality Management* 8 (3) : 487 - 501
- [71] Wu, H., dan Patel, C. 2015. An Integrated Institutional Perspective : Adoption of Anglo-American Models of Corporate Governance and Financial Reporting in China. *Studies in Managerial and Financial Accounting* 29 : 73-96.
- [72] _____. 2010. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintah.